

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah aplikasi dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi. Aplikasi SAKTI digunakan untuk menggantikan Aplikasi Eksisting yang saat ini digunakan oleh Satker yaitu Aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan per 31 Desember 2025. Entitas berkedudukan di Jalan Laks. R.E. Martadinata Tanjungpandan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Perikanan Terpadu.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN. Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegritaskan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SAKTER dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul penganggaran .
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan

sub modul Manajemen Komitmen). Modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

3. Proses Pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Portal SPAN

A.3. Portal SPAN

Portal SPAN merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama Satker tidak perlu secara langsung datang ke KPPN untuk menyamaikan ADK, namun cukup masuk ke Portal SPAN dan mengakses menu yang ada untuk melakukan pengiriman ADK ke SPAN. Sebaliknya, penerimaan data dari SPAN juga akan dilakukan melalui Portal SPAN, sehingga Satker tidak perlu lagi datang ke KPPN. Portal SPAN juga digunakan untuk melakukan validasi atas ADK yang dikirimkan oleh Satker. Validasi merupakan tanda bukti bahwa ADK berasal dari satker yang benar dan telah diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang.

SMS SPAN

A.4. SMS SPAN

SMS SPAN merupakan sarana yang disediakan untuk satker dalam memonitor status pengiriman ADK. Data ADK dan SPAN dan mengetahui status data keuangan lainnya. Satker cukup mengirimkan SMS dengan format yang ditentukan SPAN – SMS service. Sistem SPAN akan mengirimkan informasi yang diperlukan secara otomatis. Pengecekan keabsahan SMS tersebut akan dilakukan oleh sistem melalui *Personal Identification Number* (PIN) yang identik, khusus dan hanya diketahui oleh pejabat satker yang berwenang. Dengan demikian pejabat tersebut bertanggungjawab penuh atas penggunaan PIN dalam komunikasi data SMS SPAN yang otomatis menjamin keabsahan suatu SMS yang dikirimkan ke portal SPAN.

Keamanan data sakti

A.5. Keamanan Data Sakti

Keamanan data sebagai hasil dari SAKTI menjadi salah satu perhatian yang sangat krusial dan sudah dipikirkan dalam penerapan SPAN semua data yang di pertukarkan dalam interkoneksi SAKTI dan SPAN harus memenuhi syarat keamanan yang ketat sebagai berikut :

1. Pembatasan akses ke portal SPAN

Hanya pihak-pihak yang terdaftar sebagai user saja yang bisa mengakses/menggunakan portal SPAN.

2. Kerahasiaan Data

ADK SAKTI akan menggunakan pengamanan berupa *hash code* untuk masing-masing data sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan tidak akan berubah selama proses perpindahan data.

3. Keaslian data

Setiap ADK akan dijamin keasliannya menggunakan PIN. Penggunaan PIN memastikan bahwa ADK telah diketahui, disetujui dan diotorisasi oleh pejabat satker yang berwenang.

Berbagai Modul yang ada di SAKTI :

1. Modul Penganggaran
2. Modul Komitmen
3. Modul Pembayaran
4. Modul Bendahara
5. Modul Persediaan
6. Modul Aset Tetap
7. Modul Pelaporan
8. Modul Administrastrator.

Pendapatan- LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).

- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 2) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- 3) Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- 4) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

9. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- 1) Tanah;
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp2.216.786.546*

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.216.786.546 atau mencapai 119.84% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.849.720.000. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Semester II T.A. 2025 terdiri dari:

MAP 425129 yaitu Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp3.725.564.

MAP 425131 yaitu Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan didapat dari Sewa rumah dinas yang dipotong dari gaji pegawai melalui SPM Gaji Sebesar Rp0.

MAP 425151 yaitu Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi yaitu Jasa Kendaraan, Jasa Tangki BBM dan Instalasinya, Jasa Alat (Jasa Forklif, Jasa Dumptruk, Jasa Kendaraan Tangki Air, Jasa Dok, Jasa Bengkel, Tanah (Biaya Pengembangan, Pemeliharaan Prasarana, Bangunan Pelabuhan Perikanan) serta Tanah yang dipakai untuk (Jasa Lapangan Penjemuran Jaring dan Tempat Penumpukan Barang) serta Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana. Sebesar Rp686.841.419.

MAP 425621 yaitu Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan Terdiri dari Jasa Tambat Labuh, Jasa Pas Masuk, Jasa Pengadaan Es, Jasa Pengadaan air (Air eceran, Air Mobil Tangki, Air Langganan) dan Jasa Kebersihan Pelabuhan (Jasa Kebersihan Kawasan dan Jasa Kebersihan Kolam Pelabuhan) sebesar Rp1.526.219.281.

MAP 425911 yaitu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp282.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d. Per 31 Desember
2025 & 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.725.564		
-Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	13.380.048	-100,00
-Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	686.841.419	593.374.419	15,75
-Pendapatan Jasa Pelab.Perikanan	1.526.219.281	1.344.636.583	13,50
Pendapatan Jasa Lainnya		-	
Pendapatan Anggaran Lain-Lain		-	0,00
Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TA	282	281	0,36
JUMLAH	2.216.786.546	1.951.391.331	13,60

*Realisasi Belanja
Negara
Rp 9.972.739.885*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp9.972.739.885 atau 95,84% dari anggaran belanja sebesar Rp10.405.346.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI	6.632.871.000	6.610.431.553	99,66
BELANJA BARANG	3.099.158.000	2.726.647.132	87,98
BELANJA MODAL	673.317.000	635.661.200	94,41
TOTAL BELANJA KOTOR	10.405.346.000	9.972.739.885	95,84
PENGEMBALIAN BELANJA	-	-	-
JUMLAH	10.405.346.000	9.972.739.885	95,84

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.610.431.553	5.820.465.516	13,57
Belanja Barang	2.726.647.132	5.129.216.674	(46,84)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	635.661.200	1.689.230.325	(62,37)
Jumlah	9.972.739.885	12.638.912.515	(21,09)

Belanja Pegawai
Rp6.610.431.553

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.610.431.553 atau sebesar 99,66% dan Rp5.820.465.516 atau sebesar 99,97%. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 13,57% persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penerimaan CPNS baru tahun 2025 dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
2. Adanya penerimaan PPPK baru tahun 2025 dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
3. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.117.036.476	1.822.285.970	16,17
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.327.781.110	1.161.762.726	14,29
Belanja Lembur	9.239.000	65.206.000	(85,83)
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PNS	1.938.301.599	1.659.201.363	16,82
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PPPK	1.226.935.831	1.112.009.457	10,34
Jumlah Belanja Kotor	6.619.294.016	5.820.465.516	13,72
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS		-	-
Pengembalian Belanja pembulatan Gaji PNS	136	369	-
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS			-
Pengambalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		720.000	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	370.100	-	-
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	8.492.200		
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27	104	-
Jumlah Belanja	6.610.431.553	5.819.745.043	13,59

*Belanja Barang dan
Jasa
Rp2.726.647.132*

B.4. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.726.647.132 dan Rp5.129.216.674 Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp2.402.569.542) atau sebesar (46,84%) dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

- Adanya Automatic Adjustment yaitu Pemblokiran sebagian anggaran di beberapa akun.

Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	471.096.254	1.395.937.992	(66,25)
Belanja pengiriman surat dinas pusat	-	2.728.600	(100,00)
Belanja Honor operasional Satker	104.040.000	107.808.000	(3,50)
Belanja Barang Operasional Lainnya	125.277.744	128.176.963	(2,26)
Belanja Bahan	114.097.686	214.116.385	(46,71)
Belanja Honor output kegiatan	17.300.000	39.750.000	(56,48)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27.085.604	32.541.237	(16,77)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58.046.800	40.709.094	42,59
Belanja langganan Listrik	245.217.678	326.036.144	(24,79)
Belanja langganan Telpn	39.254.404	32.221.711	21,83
Belanja langganan Daya dan Jasa lainnya	3.326.280	3.755.480	(11,43)
Belanja Jasa Konsultan	-	60.000.000	(100,00)
Belanja sewa	1.050.000	1.260.000	(16,67)
Belanja Jasa profesi	10.800.000	8.500.000	27,06
Belanja jasa lainnya	595.820.000	39.880.631	1.394,01
Belanja Pemeliharaan	777.623.851	1.741.552.472	(55,35)
Belanja Perjalanan Dinas	136.610.831	954.241.965	(85,68)
Jumlah Belanja	2.726.647.132	5.129.216.674	(46,84)

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 bernilai sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 yaitu 0%. Tidak ada Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal Tanah
Rp0,-*

B.6. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dikarenakan tidak adanya anggaran yang diperuntukkan belanja modal tanah tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp635.661.200*

B.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp635.661.200 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp1.118.181.325 . Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, selain itu terdapat juga Surat Menteri Keuangan Nomor S-

37/MK.02/2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja K/L dalam pelaksanaan APBN 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	635.661.200	1.118.181.325	-43,15
Jumlah Belanja Kotor	635.661.200	1.118.181.325	-43,15
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	635.661.200	1.118.181.325	-43,15

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp571.049.000. Pada tahun 2025 Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak ada realisasi sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,89%.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan			
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	571.049.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	571.049.000	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	0	
Jumlah Belanja	0	571.049.000	-100,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0

B.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp1.689.230.325 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dikarenakan adanya efisiensi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2025	T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	-	1.689.230.325,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	1.689.230.325,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	- 7.098.675,00	0,00
Jumlah Belanja	-	1.696.329.000,00	0,00

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.10. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0,- karena tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya di TA 2025 dan TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan TA.2024 adalah Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran		
-Uang Tunai di Brankas	-	-
-Uang di Rekening Bank	-	
-Kwitansi UP	-	-
-Selisih Kas	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0.-*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan TA.2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak diperbolehkan ada karena Peraturan Bendahara harus menyetorkan langsung pendapatan pada hari itu juga.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2025	TH 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan TA.2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp995.575

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan TA.2024 masing-masing adalah sebesar Rp995.575 dan Rp1.040.135 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	995.575	1.040.135
	-	-
Jumlah	995.575	1.040.135

Piutang Bukan
Pajak
Rp0

C.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang Lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA
Rp0

C.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1			
2			
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0*

C.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Beban Dibayar di
Muka Rp0*

C.9. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2025	TH 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp 9.268.200

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.268.200 dan Rp4.710.000 mengalami kenaikan sebesar Rp4.558.200 atau sebesar 96.78%.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2025	TH 2024
Persediaan :		
- Barang Konsumsi	9.268.200	4.710.000
- Suku Cadang	-	
Jumlah	9.268.200	4.710.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi berupa pembelian Pencetakan Blangko dan Karcis Pas Masuk berada dalam kondisi baik sesuai Berita Acara Stock Opname nomor : B.16/PPNTP/PL.450/II/2026 tanggal 2 Januari 2026.

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang

diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2023
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

TPA Rp 0

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah Rp
112.842.552.000

C.14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp112.842.552.000. dan Rp112.842.552.000. Tidak mengalami kenaikan dan penurunan harga pada tahun 2025. Pada Tahun 2025 dengan rincian Revaluasi Aset Tetap pada Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II sebesar Rp(23.199.000), Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp(131.035.000) dan Tanah untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp(437.128.000). Tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan berupa tanah yang diperuntukkan Rumah Dinas Kepala Pelabuhan, tanah untuk Rumah Mess Karyawan, tanah untuk Bangunan Kantor, tanah untuk Tempat Kerja Lainnya dan tanah untuk Bangunan air bersih. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	112.842.552.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	112.842.552.000

Rincian saldo Tanah Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	856 M2	Jl. Laks. R.E.Martadinata	1,113,281,000
2	1.120 M2	Jl. Laks. R.E.Martadinata	1,635,000,000
3	49.858 M2	Jl. Laks. R.E. Martadinata	104,331,604,000
4	2.500M2	Jl. Gunung Sadai	838,190,000
5	3.208M2	Jl. Gunung Sadai	533,539,000
6	3.600M2	Jl.Laks. R.E. Martadinata	4,390,938,000
Jumlah			112,842,552,000

*Peralatan dan Mesin
Rp 13.474.370.496*

C.15.Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp13.474.370.496 dan Rp13.340.053.228. Mengalami kenaikan sebesar Rp134.317.268 atau sebesar 1,01%. Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi

PPN Tanjungpandan :

- Printer Epson L3211 sebanyak 6 unit dengan harga satuan sebesar Rp3.424.350. Total belanja sebesar Rp20.546.100.
- Projector/Infocus Acer X1 sebanyak 2 unit dengan harga satuan sebesar Rp7.540.600. Total belanja sebesar Rp15.081.200.
- Laptop Notebook i5 Asus sebanyak 10 unit dengan harga satuan sebesar Rp17.124.217. Total belanja sebesar Rp171.242.167.
- Scanner Epson DS-1630 sebanyak 5 unit dengan harga satuan sebesar Rp10.092.675. Total belanja sebesar Rp50.463.375
- Televisi 43" Xiaomi A 2025 FHD sebanyak 4 unit dengan harga satuan sebesar Rp4.645.350. Total belanja sebesar Rp18.581.400.
- PC Axioo AIO Hype Flex 3+ Win 11 Pro sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp8.600.000.
- CCTV PTZ Hik DS-2DE4225IW sebanyak 1 paket dengan harga Rp64.602.000.

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi

PP Binaan :

- Printer Epson L3211 sebanyak 6 unit dengan harga

satuan sebesar Rp.3.424.350. Total belanja sebesar Rp20.546.100.

- Projector/Infocus Acer X1 sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp7.540.600.
- Laptop Notebook i5 Asus sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp17.124.217. Total belanja sebesar Rp136.993.733.
- Scanner Epson DS-1630 sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp10.092.675. Total belanja sebesar Rp30.278.025.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	13.340.053.228
Mutasi bertambah	134.317.268
Hibah Barang	0
Transfer Masuk :	570.252.741
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	13.474.370.496
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	13.474.370.496

*Gedung dan
Bangunan
Rp 25.360.153.772*

C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 25.360.153.772 dan Rp 25.122.165.772. Terdapat mutasi penambahan pada semester II tahun 2025 sebesar Rp237.988.000 atau sebesar 0,95%. Realisasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan TA. 2025 berupa :

1. Bangunan gedung kantor permanen
2. Bangunan gedung pertemuan permanen
3. Rumah negara golongan II tipe C permanen

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	25.122.165.772
Mutasi tambah:	237.988.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	25.360.153.772
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	25.360.153.772

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp22.927.593.548

C.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jembatan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.927.593.548 dan Rp22.609.199.648. Mengalami kenaikan sebesar Rp318.393.900 atau sebesar 1,41%.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	22.609.199.648
Mutasi tambah:	318.393.900
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	22.927.593.548
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	22.927.593.548

Aset Tetap Lainnya
Rp31.100.000

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp31.100.000 dan Rp31.100.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk tahun 2025.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp137.700.050 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan TPI Permanen yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(31.195.676.179)

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(31.195.676.179) dan Rp(28.817.897.777) mengalami kenaikan sebesar Rp(2.377.778.402) atau sebesar 8,25%. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	112.842.552.000		112.842.552.000
Peralatan dan Mesin	13.474.370.496	11.202.865.130	2.271.505.366
Gedung dan Bangunan	25.360.153.772	8.724.647.821	16.635.505.951
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.927.593.548	11.268.163.228	11.659.430.320
Aset Tetap Lainnya	31.100.000	0	31.100.000
Akumulasi Penyusutan	-31.195.676.179	31.195.676.179	0
Jumlah Aset Tetap	143.440.093.637	31.195.676.179	143.440.093.637

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp15.365.000. Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi SIMDOK, aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	15.365.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang: Penghapusan Aplikasi SIMDOK	(15.365.000)
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Lain-lain
Rp355.282.502

C.22. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan. (Aset lain-lain)

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp355.282.502 dan Rp368.358.502. Aset lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas berupa Mesin Skrup, Printer, Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 kva, Lampu Suar, Bangunan Bengkel atau Hanggar Permanen, PC Unit, Station Wagon, Bangunan Kolam atau Bak Ikan, Focusing Screen atau LCD Projector, Jaringan Pembawa kapasitas kecil, Jalan Provinsi Lokal, Bangunan Gedung Permanen, Bangunan Irigasi Teknis, Perkakas Kantor Lainnya, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Stationery Compresor, Kardex Besi, AC Spluit, Pesawat Telepon, Mesin Penghisap Debu, Saluran Sekunder, Saluran Tersier Pembuang, Stationary Generating Set, Pompa Tangan. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	368.358.502
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	528.408.333
per 31 Desember 2025	355.282.502
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	
Nilai Buku per 31 Desember 2025	355.282.502

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(240.663.155)*

C.23. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(240.663.155) dan Rp(242.792.686). Mengalami penurunan di Semester II Tahun 2025 ini. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
- Software	-	-	-
Aset Lain-Lain	355.282.502	225.298.155	129.984.347
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	- 240.663.155	15.365.000	- 256.028.155
Jumlah	114.619.347	240.663.155	- 126.043.808

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.24. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN

sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp19.672.468*

C.25. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.672.468 dan Rp26.121.522. Mengalami penurunan sebesar Rp(6.449.054) atau sebesar (24,69%). Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rinciannya Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Langganan Listrik	18.566.131
2	Langganan Telepon	1.106.337
TOTAL		19.672.468

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp356.887.521*

C.26. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp356.887.521 dan Rp21.635.522. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima Dimuka tersebut bersumber dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA.2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	307.646.427
2	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	49.241.094
	TOTAL	356.887.521

*Beban Yang Masih
Harus Dibayar Rp.0*

C.27. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp26.121.522 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024
1	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	25.015.185
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	1.106.337
	JUMLAH	-	26.121.522

*Ekuitas
Rp143.560.653.818*

C.28. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp143.560.653.818 dan Rp145.595.173.320. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp1.877.764.141

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.877.764.141 dan Rp1.930.745.173 mengalami penurunan sebesar Rp(52.981.032) atau sebesar (2,74%). Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
-Pendapatan yang Masih Harus Diterima	995.575	1.040.135	(4)
-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.725.564	-	
-Pend.sewa tanah,gedung dan bangunan	-	13.380.048	(100)
-Pend.Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	400.830.514	571.738.897	(29,89)
-Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.476.933.627	1.345.626.228	9,76
-Pendapatan Anggaran Lain-lain		-	
-Penerimaan kembali Bel.pegawai TAYL	282	281	0,36
Jumlah	1.882.485.562	1.931.785.589	(2,55)

Pendapatan Sewa gedung dan bangunan MAP 425131 merupakan pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Pegawai yang dipotong langsung melalui SPM Gaji Pegawai.

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi MAP 425151 merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa Kendaraan, Jasa Tangki BBM, Jasa Dok, Jasa Bengkel, Jasa Tanah (Biaya Pengembangan, Pemeliharaan Prasarana dan Bangunan Pelabuhan Perikanan) serta Tanah yang dipakai untuk (Jasa Lapangan Penjemuran Jaring dan Tempat Penumpukan Barang).

Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana MAP 425621 yaitu Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari Jasa Tambat Labuh, Jasa Pas Masuk, Jasa Pengadaan Es dan Jasa Kebersihan Pelabuhan.

Pendapatan Jasa lainnya MAP.425699 yaitu Jasa Pemakaian Listrik dan Anggaran Lain-lain MAP 425999.

Beban Pegawai
Rp6.610.431.553

D.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.610.431.553 dan Rp5.823.051.306. Mengalami kenaikan sebesar Rp787.380.247 atau sebesar 13,52%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, PPPK, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	4.057.967.839	3.483.164.797	16,50
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	2.546.224.714	2.274.680.509	0,00
Beban Lembur PNS	2.065.000	35.210.000	-94,14
Beban Lembur PPPK	7.174.000	29.996.000	0,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-136	-369	-63,14
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	-370.100	-720.000	0,00
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	-8.492.200		0,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-27	104	0,00
Jumlah	6.604.569.090	5.822.330.833	13,44

Beban Persediaan
Rp48.743.600

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp48.743.600 dan Rp42.184.730. Mengalami kenaikan sebesar Rp6.558.870 atau sebesar 15,55%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, pencetakan blangko dan persediaan Pita cukai, meterai dan leges termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	48.743.600	42.184.730	15,55
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			-
Beban Persediaan Suku Cadang			-
Beban Persediaan pita cukai, materai dan			
Beban barang			
Beban Persediaan Bahan Baku			
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	48.743.600	42.184.730	15,55

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.747.916.596*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.747.916.596 dan Rp2.386.292.818. Mengalami penurunan sebesar Rp(638.376.222) atau sebesar (26,75%). Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang–barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024
Beban Keperluan Perkantoran	471.096.254	1.395.937.992
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		2.728.600
Beban honor Operasional Satuan Kerja	104.040.000	107.808.000
Beban Barang Operasional lainnya	125.277.744	128.176.963
Beban Bahan	114.097.686	214.116.385
Beban honor Output Kegiatan	17.300.000	39.750.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	27.085.604	32.541.237
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-
Beban Langganan Listrik	238.768.624	321.308.299
Beban Langganan Telepon	39.254.404	30.529.231
Beban Langganan Daya dan jasa lainnya	3.326.280	3.755.480
Beban Jasa Konsultan		60.000.000
Beban Jasa Sewa	1.050.000	1.260.000
Beban Jasa Profesi	10.800.000	8.500.000
Beban Jasa Lainnya	595.820.000	39.880.631
Jumlah	1.747.916.596	2.386.292.818

**Beban
Pemeliharaan
Rp782.368.851**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp782.368.851 dan Rp1.790.072.922 mengalami penurunan sebesar (Rp1.007.704.071) atau (56,29%). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	519.901.715	1.094.823.567	-110,58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246.532.136	418.120.517	-69,60
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		18.470.000	0,00
Beban Pemeliharaan Irigasi		163.678.000	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	11.190.000	46.460.388	100,00
Beban Ekstrakomtabel gedung dan bangunan		48.520.450	100,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	-		0,00
Jumlah	777.623.851	1.790.072.922	-130,20

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp136.610.831**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp136.610.831 dan Rp954.241.965. Mengalami penurunan sebesar Rp(817.631.134) atau sebesar (85,68%). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.704.725	580.947.156	-94,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.350.000	39.725.000	-66,39
Beban Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota	27.620.000	17.700.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.936.106	315.869.809	-80,39
Jumlah	136.610.831	954.241.965	-85,68

**Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2023. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2021	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

**Beban Bantuan
Sosial Rp0**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2021	% NAIK (TURUN)
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

**Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.914.031.155**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.914.031.155 dan Rp2.495.641.680. Mengalami kenaikan sebesar Rp418.389.475 atau sebesar 16,76%. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	619.007.138	521.245.274	18,76
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.136.426.782	1.134.045.635	0,21
Beban Penyusutan Jalan, dan jembatan	963.070.245	644.676.343	49,39
Beban Penyusutan Irigasi	123.931.753	123.931.752	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	54.407.624	54.407.623	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	12.204.494	12.204.494	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.983.119	5.130.559	-2,87
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.914.031.155	2.495.641.680	16,76

**Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		0	0,00
		-	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Lain-lain Rp0 **D.11. Beban Lain-lain**

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp282

D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp282 dan Rp419.719 sehingga Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp282 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	282	419.719	- 100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	282	419.719	- 100

Pos Luar Biasa Rp(0)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp145.595.173.320

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp145.595.173.320 dan Rp146.623.045.750 mengalami penurunan sebesar Rp(1.027.872.430) atau sebesar (0,70%).

Defisit LO

Rp(10.360.725.582)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(10.360.725.582) dan Rp(11.561.159.967) mengalami penurunan sebesar Rp1.200.434.385 atau sebesar (10,38%). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0 ,- Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.138.368. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian uang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,- .

**Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi Rp0**

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(265.859.944). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena penilaian ulang aset.

Koreksi lain-lain Rp0

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi lainnya, Ekuitas Transaksi Lainnya, Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu, SAL Selisih Kurs Belum terealisasi dan Penyesuaian SAL BLU atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi Lain-lain untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.929. Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

**Transaksi Antar
Entitas
Rp8.326.206.080**

E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.326.206.080 dan Rp10.795.996.184. Mengalami penurunan sebesar Rp(2.469.790.104) atau (22,88%). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA.2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	2.216.786.546
Ditagihkan ke Entitas Lain	- 9.972.739.885
Transfer Masuk	- 570.252.741
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	- 8.326.206.080

Penurunan Ekuitas
Rp(2.034.519.502)

E.10. Penurunan Ekuitas

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(2.034.519.502) dan Rp(1.027.872.430) mengalami kenaikan sebesar Rp(1.006.647.072) atau 97,94%.

Ekuitas Akhir
Rp143.560.653.818

E.11. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp143.560.653.818 dan Rp145.595.173.320 mengalami penurunan sebesar Rp(2.034.519.502) atau (1,40%).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp.339.917.502 kondisi sudah rusak berat dan masih dalam tahap persiapan pengusulan penghapusan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 10:59 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	145,595,173,320	146,623,045,750	(1,027,872,430)	(0.7)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,360,725,582)	(11,561,159,967)	1,200,434,385	(10.38)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(262,708,647)	262,708,647	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	3,138,368	(3,138,368)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(265,859,944)	265,859,944	(100)
LAIN-LAIN	0	12,929	(12,929)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,326,206,080	10,795,996,184	(2,469,790,104)	(22.88)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,034,519,502)	(1,027,872,430)	(1,006,647,072)	97.94
EKUITAS AKHIR	143,560,653,818	145,595,173,320	(2,034,519,502)	(1.4)

Keterangan :

FINAL

TANJUNG PANDAN, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ARIF USMAN

NIP 197902262003121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN TANGKAP 03
SATUAN KERJA : PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN 239221

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:03 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,849,720,000	2,216,786,546	367,066,546	120	1,835,595,000	1,951,391,331	(115,796,331)	106
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,849,720,000	2,216,786,546	367,066,546	120	1,835,595,000	1,951,391,331	(115,796,331)	106
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,849,720,000	2,216,786,546	367,066,546	120	1,835,595,000	1,951,391,331	(115,796,331)	106
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	10,405,346,000	9,972,739,885	(432,606,115)	96	13,092,461,000	12,638,912,515	453,548,485	97
1. Belanja Pegawai	6,632,871,000	6,610,431,553	(22,439,447)	100	5,821,657,000	5,820,465,516	1,191,484	100
2. Belanja Barang	3,099,158,000	2,726,647,132	(372,510,868)	88	5,574,475,000	5,129,216,674	445,258,326	92
3. Belanja Modal	673,317,000	635,661,200	(37,655,800)	94	1,696,329,000	1,689,230,325	7,098,675	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN TANGKAP 03
SATUAN KERJA : PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN 239221

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:03 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	10,405,346,000	9,972,739,885	(432,606,115)	96	13,092,461,000	12,638,912,515	453,548,485	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

TANJUNG PANDAN, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ARIF USMAN
NIP 197902262003121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 239221
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP
BANGKA BELITUNG
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 11:07 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 7:55 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	247,171,000	1,458,710,000	1,458,707,940	0	1,458,707,940	100	2,060
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,000	21,000	19,629	136	19,493	92.82	1,507
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	26,824,000	121,836,000	121,834,194	0	121,834,194	100	1,806
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,576,000	35,787,000	35,784,758	0	35,784,758	99.99	2,242
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	43,100,000	117,860,000	117,860,000	0	117,860,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,119,000	11,444,000	11,442,875	0	11,442,875	99.99	1,125
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,070,000	88,644,000	88,642,080	0	88,642,080	100	1,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	156,926,000	224,100,000	224,040,000	0	224,040,000	99.97	60,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	30,685,000	33,505,000	33,505,000	370,100	33,134,900	98.9	370,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	592,687,000	2,117,107,000	2,117,036,476	370,236	2,116,666,240	99.98	440,760
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	203,476,000	915,799,000	915,798,300	8,492,200	907,306,100	99.07	8,492,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19,000	22,000	19,538	27	19,511	88.69	2,489
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,886,000	42,000,000	41,997,320	0	41,997,320	99.99	2,680
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,665,000	13,910,000	13,909,252	0	13,909,252	99.99	748
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32,960,000	124,560,000	124,560,000	0	124,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,870,000	49,610,000	49,607,700	0	49,607,700	100	2,300
511628	Belanja Uang Makan PPPK	99,641,000	175,510,000	175,409,000	0	175,409,000	99.94	101,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	376,517,000	1,327,891,000	1,327,781,110	8,492,227	1,319,288,883	99.35	8,602,117
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	10,252,000	9,252,000	2,065,000	0	2,065,000	22.32	7,187,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	9,000,000	8,142,000	7,174,000	0	7,174,000	88.11	968,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	19,252,000	17,394,000	9,239,000	0	9,239,000	53.12	8,155,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,776,206,000	1,942,302,000	1,938,301,599	0	1,938,301,599	99.79	4,000,401
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,708,237,000	1,228,177,000	1,226,935,831	0	1,226,935,831	99.9	1,241,169
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,484,443,000	3,170,479,000	3,165,237,430	0	3,165,237,430	99.83	5,241,570
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,472,899,000	6,632,871,000	6,619,294,016	8,862,463	6,610,431,553	99.66	22,439,447
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 239221
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP
BANGKA BELITUNG
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 11:07 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 7:55 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	469,578,000	472,332,000	471,096,254	0	471,096,254	99.74	1,235,746
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,717,000	0	0	0	0		0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	99,960,000	104,040,000	104,040,000	0	104,040,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	243,132,000	126,081,000	125,277,744	0	125,277,744	99.36	803,256
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	816,387,000	702,453,000	700,413,998	0	700,413,998	99.71	2,039,002
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	88,522,000	164,719,000	114,097,686	0	114,097,686	69.27	50,621,314
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	23,200,000	31,500,000	17,300,000	0	17,300,000	54.92	14,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	46,643,000	57,734,000	27,085,604	0	27,085,604	46.91	30,648,396
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	158,365,000	253,953,000	158,483,290	0	158,483,290	62.41	95,469,710
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,700,000	63,050,000	58,046,800	0	58,046,800	92.06	5,003,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	57,700,000	63,050,000	58,046,800	0	58,046,800	92.06	5,003,200
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	384,000,000	245,500,000	245,217,678	0	245,217,678	99.89	282,322
522112	Belanja Langganan Telepon	38,400,000	39,371,000	39,254,404	0	39,254,404	99.7	116,596
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,670,000	3,327,000	3,326,280	0	3,326,280	99.98	720
522131	Belanja Jasa Konsultan	49,950,000	49,950,000	0	0	0	0	49,950,000
522141	Belanja Sewa	2,000,000	3,050,000	1,050,000	0	1,050,000	34.43	2,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	400,000	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	870,464,000	628,340,000	595,820,000	0	595,820,000	94.82	32,520,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,348,884,000	980,338,000	895,468,362	0	895,468,362	91.34	84,869,638
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	816,845,000	520,054,000	519,901,715	0	519,901,715	99.97	152,285
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	445,624,000	248,389,000	246,532,136	0	246,532,136	99.25	1,856,864
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	252,450,000	0	0	0	0		0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	25,006,000	11,194,000	11,190,000	0	11,190,000	99.96	4,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,539,925,000	779,637,000	777,623,851	0	777,623,851	99.74	2,013,149
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	353,565,000	85,812,000	33,704,725	0	33,704,725	39.28	52,107,275
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,720,000	20,820,000	13,350,000	0	13,350,000	64.12	7,470,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	28,060,000	27,620,000	0	27,620,000	98.43	440,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	338,350,000	185,035,000	61,936,106	0	61,936,106	33.47	123,098,894
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	701,635,000	319,727,000	136,610,831	0	136,610,831	42.73	183,116,169

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 239221
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP
BANGKA BELITUNG
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 11:07 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 7:55 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,622,896,000	3,099,158,000	2,726,647,132	0	2,726,647,132	87.98	372,510,868
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	962,557,000	673,317,000	635,661,200	0	635,661,200	94.41	37,655,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	962,557,000	673,317,000	635,661,200	0	635,661,200	94.41	37,655,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	962,557,000	673,317,000	635,661,200	0	635,661,200	94.41	37,655,800
	JUMLAH BELANJA	10,058,352,000	10,405,346,000	9,981,602,348	8,862,463	9,972,739,885	95.84	432,606,115

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 239221

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP
BANGKA BELITUNG
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/26 11:07 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,725,564	0	3,725,564	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13,381,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	613,417,000	686,841,419	0	686,841,419	111.97
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	626,798,000	690,566,983	0	690,566,983	110.17
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1,222,922,000	1,526,219,281	0	1,526,219,281	124.8
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	1,222,922,000	1,526,219,281	0	1,526,219,281	124.8
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	282	0	282	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	282	0	282	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,849,720,000	2,216,786,546	0	2,216,786,546	119.84
	JUMLAH PENDAPATAN	1,849,720,000	2,216,786,546	0	2,216,786,546	119.84

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:04 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	995,575	1,040,135	(44,560)	(4.28)
Persediaan	9,268,200	4,710,000	4,558,200	96.78
JUMLAH ASET LANCAR	10,263,775	5,750,135	4,513,640	78.50
ASET TETAP				
Tanah	112,842,552,000	112,842,552,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	13,474,370,496	13,340,053,228	134,317,268	1.01
Gedung dan Bangunan	25,360,153,772	25,122,165,772	237,988,000	0.95
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,927,593,548	22,609,199,648	318,393,900	1.41
Aset Tetap Lainnya	31,100,000	31,100,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(31,195,676,179)	(28,817,897,777)	(2,377,778,402)	8.25
JUMLAH ASET TETAP	143,440,093,637	145,127,172,871	(1,687,079,234)	(1.16)
Properti Investasi				
Properti Investasi	469,873,000	469,873,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(97,635,952)	(85,431,458)	(12,204,494)	14.29
JUMLAH Properti Investasi	372,237,048	384,441,542	(12,204,494)	(3.17)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	355,282,502	368,358,502	(13,076,000)	(3.55)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(240,663,155)	(242,792,686)	2,129,531	(0.88)
JUMLAH ASET LAINNYA	114,619,347	125,565,816	(10,946,469)	(8.72)
JUMLAH ASET	143,937,213,807	145,642,930,364	(1,705,716,557)	(1.17)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,672,468	26,121,522	(6,449,054)	(24.69)
Pendapatan Diterima Dimuka	356,887,521	21,635,522	335,251,999	1,549.54
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	376,559,989	47,757,044	328,802,945	688.49
JUMLAH KEWAJIBAN	376,559,989	47,757,044	328,802,945	688.49
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	143,560,653,818	145,595,173,320	(2,034,519,502)	(1.40)
JUMLAH EKUITAS	143,560,653,818	145,595,173,320	(2,034,519,502)	(1.40)
JUMLAH EKUITAS	143,560,653,818	145,595,173,320	(2,034,519,502)	(1.40)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143,937,213,807	145,642,930,364	(1,705,716,557)	(1.17)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:04 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

TANJUNG PANDAN, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ARIF USMAN
NIP 197902262003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG
PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:06 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	995,575	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,268,200	0
0.0	131111	Tanah	112,842,552,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	13,474,370,496	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	25,360,153,772	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	17,130,444,188	0
0.0	134112	Irigasi	4,206,510,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,590,639,360	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	31,100,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,202,865,130
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,724,647,821
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	7,909,154,111
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,616,456,015
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	742,553,102
0.0	138311	Properti Investasi	469,873,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	97,635,952
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	339,917,502	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	15,365,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	225,298,155
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	15,365,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	19,672,468
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	356,887,521
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,972,739,885
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,216,786,546	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	570,252,741
0.0	391111	Ekuitas	0	145,595,173,320
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,725,564
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	400,830,514
3.0	425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	1,476,933,627
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	282
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,458,707,940	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	19,493	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	121,834,194	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	35,784,758	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	117,860,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,442,875	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG
PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:06 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	88,642,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	224,040,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	33,134,900	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	907,306,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	19,511	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	41,997,320	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	13,909,252	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	124,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	49,607,700	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	175,409,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	6,480,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	2,065,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	7,174,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,938,301,599	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,226,935,831	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	471,096,254	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104,040,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	125,277,744	0
3.0	521211	Beban Bahan	114,097,686	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	17,300,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	27,085,604	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	238,768,624	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	39,254,404	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,326,280	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,050,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	595,820,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	519,901,715	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246,532,136	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	11,190,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33,704,725	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,350,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,620,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61,936,106	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	619,007,138	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,136,426,782	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	963,070,245	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	123,931,753	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG
PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:06 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	54,407,624	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	12,204,494	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,983,119	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	48,743,600	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	4,745,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,112,983	0
JUMLAH			189,930,191,208	189,930,191,208

Keterangan :

FINAL

TANJUNG PANDAN, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ARIF USMAN

NIP 197902262003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG
PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:06 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	9,972,739,885
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,216,786,546	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,725,564
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	686,841,419
3.0	425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	1,526,219,281
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	282
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,458,707,940	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,629	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	121,834,194	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,784,758	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	117,860,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,442,875	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	88,642,080	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	224,040,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	33,505,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	915,798,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19,538	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	41,997,320	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,909,252	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	124,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	49,607,700	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	175,409,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,480,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	2,065,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	7,174,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,938,301,599	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,226,935,831	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	471,096,254	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	104,040,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	125,277,744	0
3.0	521211	Belanja Bahan	114,097,686	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,300,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,085,604	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,046,800	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	245,217,678	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	39,254,404	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,326,280	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (239221) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG
PANDAN

Tgl Data : 08/05/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:06 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	1,050,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	595,820,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	519,901,715	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246,532,136	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	11,190,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,704,725	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,350,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,620,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61,936,106	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	635,661,200	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	136
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,100
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	8,492,200
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	27
JUMLAH			12,198,388,894	12,198,388,894

Keterangan :

FINAL

TANJUNG PANDAN, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ARIF USMAN

197902262003121001